

### **Kerja Sama Jakarta-New South Wales dalam Kerangka Paradiplomasi melalui IA-CEPA**

#### *Jakarta-New South Wales Cooperation in the Framework of Paradiplomacy through IA-CEPA*

**Saepudin<sup>1\*</sup>, Budiman Ibrahim<sup>2</sup>, Dheeva Maurellyya Aisyah Putri<sup>3</sup>,  
Naila Safa Amira<sup>4</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
2210412146@mahasiswa.upnvj.ac.id\*

Diterima 29 Agustus 2024 | Direvisi 18 September 2024 | Diterbitkan 30 September 2024

#### **ABSTRACT**

*The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) is the most comprehensive trade relationship agreement, covering aspects such as tariff elimination, trade facilitation, investment, downstream and economic cooperation between Indonesia and Australia. Implementing the IA-CEPA involves many actors, from business actors to sub-national governments, trying to open markets, expand business, and increase investment. Therefore, this research aims to examine the prospects of sub-national collaboration in various sectors, such as education, tourism, economy and digital business, especially between Jakarta and New South Wales. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data collection techniques through, books, journal articles, website articles, or previous research, and also supported by primary data from the official websites of related agencies. The concepts of paradiplomacy used as analytical tools in this research. By using this concept, this research concludes that the existence of sub-national IA-CEPA between the two countries has sufficient space to establish and strengthen cooperation, one of which is the sister state province cooperation between Jakarta and New South Wales by focusing on economic sustainability efforts, which has the potential to realize Jakarta's big vision as a global business city after it is no longer the capital of Indonesia.*

**Keywords:** *Global City, IA-CEPA, Jakarta, New South Wales, Sister Province*

#### **ABSTRAK**

*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan perjanjian hubungan dagang paling komprehensif yang dimiliki Indonesia, dengan meliputi aspek berupa penghapusan tarif, fasilitasi perdagangan, investasi, hilirisasi dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Dalam implementasi IA-CEPA sendiri melibatkan banyak aktor mulai pelaku bisnis hingga pemerintah sub-nasional, yang mana mereka berusaha untuk membuka pasar, ekspansi bisnis, dan peningkatan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek kolaborasi sub-nasional di berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, ekonomi,*

dan bisnis digital, terutama antara Jakarta dan New South Wales. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui, buku, artikel jurnal, artikel website, atau dengan penelitian sebelumnya, serta didukung juga oleh data primer dari situs web resmi instansi terkait. Konsep paradiplomasi digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan konsep tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya IA-CEPA sub-nasional di antara kedua negara memiliki ruang yang cukup untuk menjalin dan mempererat kerja sama, salah satunya adalah kerja sama *sister state province* Jakarta dengan New South Wales dengan berfokus pada upaya keberlanjutan ekonomi, yang mana kerja sama ini berpotensi dapat mewujudkan visi besar Jakarta sebagai kota bisnis berskala global pasca tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

**Kata kunci:** IA-CEPA, Jakarta, Kota Global, New South Wales, Sister Province

## PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan negara yang strategis dengan berada pada posisi silang iklim dan perekonomian global. Posisi yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia menguntungkan Indonesia dalam hal potensi kerja sama, baik itu kerja sama keamanan, politik, ekonomi, hingga budaya, serta dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral. Salah satu hubungan bilateral yang didasari oleh kondisi geografis yang berdekatan adalah hubungan Indonesia dan Australia. Hubungan ini bermula sejak awal masa kemerdekaan Indonesia, yang mana Australia telah menunjukkan dukungannya dengan menjadi salah satu negara yang cukup awal mengakui kedaulatan Indonesia dan menjadi *co-sponsor* untuk bergabungnya Indonesia ke PBB pada tahun 1947 (KJRI PERTH, n.d.; Wijayanti, 2015). Di samping itu, Australia sebagai benua sekaligus negara yang berbatasan maritim langsung dengan Indonesia merupakan mitra strategis dengan beragam kesamaan dan kepentingan. Berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin di antaranya *Intern Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1967, Perjanjian Celah Timor 1989, *Australia-Indonesia Institute* 1989, dan masih banyak lagi (Wijayanti, 2015).

Kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip bertetangga baik atau *Good Neighborhood* dengan tanpa mengancam atau bahkan merugikan kepentingan nasional satu sama lain. Dalam konteks diplomasi, prinsip ini memberikan panduan kepada negara-negara untuk membina hubungan persahabatan dan kerja sama antara negara-negara tetangga, yang mana hal ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pada pokoknya *Good Neighborhood* ini berakar pada “Prinsip Koeksistensi Damai”, yang meliputi: Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, saling

tidak campur tangan dalam tata kelola domestik, non-agresi timbal balik, dan manfaat yang sama (Chung, 2011). Lebih lanjut menurut Haqqi (2018), Indonesia dan Australia selalu berusaha untuk mengedepankan prinsip ini, meski dalam perjalannya sering kali terdapat pasang dan surut.

Berangkat dari hal tersebut, hubungan antar kedua negara ini merupakan peluang bagi masing-masing negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Perjalanan hubungan kedua negara ini telah menemui titik puncak dengan disepakatinya *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* pada 4 Maret 2019 dan mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret antar kedua negara untuk mempererat hubungan terutama dalam bidang ekonomi. Melalui IA-CEPA hubungan ekonomi kedua negara akan semakin erat dengan adanya potensi untuk membuka pasar, ekspansi bisnis, dan peningkatan investasi (Australian Embassy Indonesia, n.d.). IA-CEPA sendiri merupakan perjanjian hubungan dagang paling komprehensif yang dimiliki oleh Indonesia, di dalamnya meliputi aspek penghapusan tarif, fasilitasi perdagangan, investasi, hilirisasi dan kerja sama ekonomi dalam bidang-bidang tertentu. Pada akhirnya kedua negara melalui IA CEPA mengharapkan adanya manfaat berupa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hubungan dagang yang semakin erat antara Indonesia dan Australia juga membuka peluang sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dalam kerangka paradiplomasi, terutama untuk mengisi perjanjian IA-CEPA. Dalam pilar kedua terkait *Connecting People, PLAN OF ACTION for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)*, memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk menjalin dan mempromosikan hubungan dengan pemerintah lokal di Australia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan perdagangan dan investasi. Selain itu, *Plan of Action* ini juga menekankan *sister city/sister province* yang telah ada harus dilaksanakan melalui implementasi program-program konkret (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Dengan ini IA-CEPA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya melalui kolaborasi dan kerja sama dengan kota-kota di Australia. Daerah yang berpeluang besar untuk mengisi perjanjian ini adalah DKI Jakarta, karena sejak 1994 Jakarta

telah memiliki kerja sama *sister province* dengan negara bagian New South Wales (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, 2023). Di sisi lain perjanjian ini juga dapat memantik daerah-daerah lain untuk melakukan kerja sama serupa. Menurut Fathun (2022), kerja sama dengan pola ini dikenal dengan ‘*multilevel government*’ yang mana *stakeholder* terkait dapat menghadirkan investasi yang kemudian akan berdampak pada perekonomian di wilayahnya bahkan secara lebih luas pada lingkup global. Secara tidak langsung kerja sama semacam ini dapat menjawab kebutuhan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda. Pada akhirnya pemberlakuan IA-CEPA ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk melakukan paradiplomasi.

Dalam konteks kerja sama *Sister Province* Jakarta dengan New South Wales, IA-CEPA berpotensi untuk menghadirkan implementasi kerja sama di beberapa bidang, seperti pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, dan keberlanjutan ekonomi. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh Jakarta mengingat dengan dikeluarkannya UU DKJ Jakarta tidak akan lagi menyandang sebagai ibu kota negara dan diproyeksikan menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, peluang kerja sama yang semakin besar antara Jakarta dan New South Wales diharapkan akan mampu menghadirkan *city branding*, *nation branding*, dan *people branding* (Fathun, 2022), yang mana citra baik tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pemulihan dan keberlanjutan ekonomi di Jakarta pasca tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Di sisi lain hal ini juga bisa menimbulkan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jakarta dan juga pemerintah pusat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab bagaimana strategi dan peran paradiplomasi dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk merealisasikan visi besarnya menjadi kota bisnis berskala global ekonomi dalam konteks *sister state province cooperation* dengan New South Wales dalam kerangka perjanjian dagang IA-CEPA?

## KERANGKA TEORI

### Konsep Paradiplomasi

Di era globalisasi yang dinamis dan saling terhubung, paradigma diplomasi dan hubungan internasional telah mengalami perubahan signifikan, yang mengarah pada munculnya mekanisme dan *platform* inovatif untuk keterlibatan diplomatik yang melampaui

model interaksi konvensional *state-to-state* berdasarkan sistem Westphalia (Mukti, 2020). Dalam perkembangannya aktor-aktor sub-negara atau pemerintah daerah juga turut ambil peran dalam hubungan luar negeri (Paquin, 2020). Selanjutnya pada tahun 1980-an muncul kajian paradiplomasi yang diperkenalkan oleh Payanotis Soldatos dengan memperkenalkan konsep baru terhadap konektivitas transnasional dengan melibatkan pemerintah lokal, khususnya desentralisasi dan federal tersebut (Cornago, 2018). Di Indonesia pada awalnya studi mengenai peran pemerintah daerah untuk memajukan wilayahnya sangat kental dengan kajian politik domestik. Tetapi kemudian, Takdir Ali Mukti (2013) menjadi akademisi pelopor dalam kajian paradiplomasi dengan menulis buku dengan judul *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*.

Hal ini juga turut merepresentasikan aktor-aktor dalam suatu negara berdaulat untuk mampu mempromosikan kepentingan dan kekhasan daerah wilayahnya di arena internasional. Sejalan dengan hal tersebut, Mukti (2013) berpendapat bahwa paradiplomasi merupakan kapasitas entitas sub-nasional untuk melakukan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai kepentingan mereka secara lebih spesifik. Hal ini memungkinkan karena sejatinya yang mengerti apa permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam perjalanannya, paradiplomasi kemudian menjadi terkenal sebagai kekuatan berpengaruh dalam hubungan internasional, terutama sebagai respon terhadap tren global menuju desentralisasi, yang mana telah terjadi pendistribusian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga memungkinkan entitas-entitas ini untuk secara langsung terlibat dalam hubungan internasional dan menjalin kemitraan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama (Atikah et al., 2023). Dalam konteks kerja sama *sister-province*, paradiplomasi adalah elemen fundamental yang memberdayakan kota untuk berpartisipasi secara mandiri dalam global, bertukar pengetahuan, sumber daya, dan praktik di berbagai bidang, termasuk perencanaan kota, kelestarian lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.

Pergeseran ke arah bentuk diplomasi yang lebih terdesentralisasi ini akan meningkatkan tata kelola pemerintahan lokal dan ketahanan masyarakat, terutama di Indonesia, di mana kebijakan desentralisasi telah diterapkan secara progresif. Lebih lanjut, aktivitas yang tercakup dalam paradiplomasi meliputi interaksi politik, budaya, dan ekonomi mewakili proses diplomasi yang beragam yang dilakukan oleh berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, provinsi, kota, dan swasta, baik itu individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep paradiplomasi ini sebagai pisau analisis dalam menjelaskan langkah Jakarta menuju kota bisnis global melalui *sister state-province cooperation* dengan New South Wales di Australia, yang mana kerja sama yang telah terjalin lama, kemudian mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri dengan disetujuinya perjanjian dagang IA-CEPA oleh masing-masing pemerintah pusat kedua negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa penelitian sebelumnya, buku, artikel jurnal, dan artikel website sebagai sumber datanya. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengoperasionalkan teori dan konsep, serta memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kali ini, yaitu peran sub-nasional dalam implementasi IA-CEPA, dengan memfokuskan pada kerja *sama sister state province* antara Jakarta dan New South Wales. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari web resmi milik Pemerintah Provinsi Jakarta, NSW Government, KBRI Australia, KJRI Sydney, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perdagangan RI, dan IA-CEPA Katalis. Data-data tersebut kemudian penulis analisis menggunakan metode interaktif dari Miles dan Huberman, dengan tiga tahapan, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Tahapan-tahapan dari metode interaktif dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, informasi mengenai peran serta pemerintah daerah dalam perundingan dan pelaksanaan IA-CEPA dikumpulkan. Kedua, informasi yang berhasil penulis kumpulkan kemudian disortir dengan berfokus pada satu pertanyaan penelitian yang akan peneliti jawab. Pada tahap ini, peneliti menyelidiki keterlibatan Pemerintah Daerah Jakarta dalam mengisi perjanjian IA-CEPA. Ketiga, data-data tersebut kemudian peneliti sajikan dalam bentuk teks agar mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, dari data-data yang disajikan kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan untuk menentukan argumen utama dari penelitian yang dilakukan. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa IA-CEPA telah membuka peluang penguatan kerja sama *sister state-province* antara Jakarta dan New South Wales, dan Jakarta memanfaatkan hal tersebut untuk merealisasikan visi besarnya menjadi kota bisnis berskala global pasca tidak menyandang status sebagai ibu kota negara.

## PEMBAHASAN

### Kilas Balik IA-CEPA sebagai Perjanjian Bilateral Paling Komprehensif

IA-CEPA merupakan perjanjian bilateral perdagangan paling anyar yang dimiliki oleh Indonesia. Merujuk pada naskah akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia, IA-CEPA dianggap penting keberadaannya karena hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam bidang penanaman modal, perdagangan, dan kerja sama ekonomi berjalan tidak optimal dan cenderung tertinggal dengan negara di ASEAN lainnya. Dari sisi Indonesia, IA-CEPA sangat penting untuk menguatkan daya saing global, mengingat Australia adalah negara mitra yang paling ideal untuk membantu Indonesia dalam mentransformasikan ekonominya melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran investasi, dan juga pengembangan sumber daya manusia (Kementerian Perdagangan, 2020).

Dalam perjalannya, perjanjian ini bermula dari adanya komitmen antara kedua negara melalui *Joint Declaration on Comprehensive Partnership 2005*, yang bertujuan untuk terciptanya kerja sama komprehensif dalam bidang ekonomi, keamanan, hingga *people to people links*. Deklarasi ini kemudian menjadi sebuah pondasi yang cukup kuat untuk memulai kerja sama bilateral yang lebih komprehensif antar kedua negara (Wulandari & Suryadipura, 2021). Pada 2007, kemudian dilakukan tindak lanjut dengan dikeluarkannya *feasibility study* dan dilanjutkan dengan proses perundingan yang berlangsung cukup panjang.

Proses perundingan IA-CEPA menunjukkan adanya pasang surut hubungan Indonesia-Australia. Perjanjian ini semulanya digagas sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan terbentuknya *IA-CEPA Pre-Agreement Facility*, yang mana badan ini berfungsi mendanai proses negosiasi. Setelah menjalani sekitar dua putaran negosiasi, proses ini pada akhirnya terhenti karena adanya ketegangan politik antar kedua negara dalam kurun waktu November 2013 sampai dengan Februari 2016 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018).

Setelah hubungan kedua negara membaik, Presiden Joko Widodo sebagai suksesor Presiden SBY akhirnya mereaktivasi proses perundingan IA-CEPA dengan mengedepankan bentuk kerja sama modern yang mampu menjawab tuntutan masyarakat di abad 21, yang mana perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi

kebutuhan (Bakri, 2024). Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak kurang 10 putaran negosiasi telah terlaksana dan berakhir pada Agustus 2018, melalui finalisasi perjanjian tingkat Menteri Perdagangan masing-masing negara dengan disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Joko Widodo (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018). Parlemen Australia kemudian meratifikasi IA-CEPA pada 26 November 2019, dan setahun kemudian DPR RI meratifikasi dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Setelah masing-masing negara meratifikasi, sesuai dengan kesepakatan IA-CEPA akan diberlakukan secara efektif setelah 60 hari ratifikasi, yaitu 5 Juli 2020 (Rissy, 2021).

Implementasi IA-CEPA sebagai perjanjian komprehensif dalam bidang perdagangan dan ekonomi memerlukan adanya atensi dari semua pihak, seperti pemerintah daerah, pengusaha dan organisasi pengusaha, organisasi kamar dagang, hingga satuan pendidikan setingkat universitas. Hal ini diperlukan untuk mencegah IA-CEPA hanya menjadi dokumen seremonial tanpa adanya tindak lanjut yang konkret.

Materi yang dimuat dalam perjanjian IA-CEPA sendiri, pada intinya berbicara tentang peluang masuknya produk Indonesia ke Australia tanpa tarif begitupun sebaliknya, mendorong masuknya investasi Australia ke Indonesia, dan menjadikan Indonesia-Australia sebagai *economic powerhouse* dalam *regional value chain*. Menurut Ni Made Ayu Marthini, selaku Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dalam sebuah Podcast di kanal Youtube HI UGM (2020), mengungkapkan bahwa IA-CEPA juga berisi tentang *economic cooperation* dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang kemudian akan menjadi modal bagi revolusi ekonomi Indonesia dari *emerging economic* menuju negara maju. Hal ini diwujudkan dalam bentuk investasi pendidikan Australia melalui peningkatan kesempatan belajar di Australia bagi pelajar Indonesia dan rencana pendidikan tinggi ternama di Australia untuk membuka kampusnya di Indonesia, hingga peningkatan pendidikan vokasi, dan *training*. Selain itu ada sektor lain yang juga dibuka IA-CEPA, seperti energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional.

Rissy (2021), mengkategorikan muatan IA-CEPA dalam lima kelompok yang didasarkan pada aspek ekonomi dan kelembagaan, di antaranya: (i) Perdagangan barang, melalui penghapusan tarif dan fasilitasi perdagangan; (ii) Perdagangan jasa, yang mencakup industri jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa profesi lainnya; (iii) Investasi, melalui adanya kebijakan anti persaingan usaha yang tidak sehat dan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, kebijakan ini dianggap perlu karena mencakup perlindungan iklim investasi dan juga perlindungan investasi dan investor; (iv) *E-commerce*, mencakup kerja sama dalam *cyberspace security* seperti perlindungan data pribadi saat bertransaksi di *E-Commerce*; dan (v) Kerja sama ekonomi lain pada umumnya.

Lebih lanjut, beberapa sektor yang memang difokuskan dalam IA-CEPA juga cukup bervariasi, mulai dari pertanian (sayur, buah-buahan, hingga produksi ternak), penguatan pendidikan vokasi dan keahlian melalui kesempatan *training* selama 6 bulan di Australia, sektor energi (migas, geothermal dan pembangkit listrik berkapasitas besar, sektor pengairan dalam konteks manajemen air, sektor transportasi, jasa pertambangan, kesehatan, dan pariwisata (Rissy, 2021).

Berangkat dari hal tersebut IA-CEPA tentunya menawarkan peluang besar, yang mana Indonesia dapat memperoleh izin masuk sementara hingga empat tahun untuk berbagai macam jasa profesional. IA-CEPA juga memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan investasi Australia di sektor-sektor seperti pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan dan teknik, pertambangan, rumah sakit, panti jompo, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam (Rusmin et al., 2021). Peluang lain yang dihadirkan oleh IA-CEPA adalah meningkatkan pengguna jasa dari Australia di Indonesia, khususnya jasa pariwisata. Dengan IA-CEPA, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi negara-negara pesaing di ASEAN. Selain itu, IA-CEPA juga memberikan syarat yang lebih mudah bagi kendaraan *hybrid* dan elektrik asal Indonesia untuk mendapatkan tarif preferensi nol persen, yang mana hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan produk Indonesia lebih dalam ke rantai pasok global. Pada akhirnya IA-CEPA diharapkan bisa menciptakan kerangka kerja yang luas untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Melalui penghapusan atau penurunan tarif untuk berbagai produk, kedua negara dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur diharapkan dapat merasakan manfaat terbesar dari perjanjian ini. Produk pertanian Indonesia, seperti kopi dan buah-buahan tropis, memiliki akses yang lebih mudah ke pasar Australia. Sebaliknya, produk susu dan daging Australia bisa lebih kompetitif di pasar Indonesia. Selain itu, peningkatan akses pasar ini juga menciptakan peluang bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di kedua negara untuk menjalin kemitraan dan memperluas jaringan bisnis mereka. Dalam hal pendidikan, IA-CEPA mendorong lebih banyak interaksi antara universitas di kedua negara, seperti program pertukaran pelajar dan kolaborasi penelitian. Industri pariwisata juga diharapkan untuk berkembang sebagai hasil dari peningkatan kunjungan wisatawan dari kedua negara, yang akan dibantu oleh peningkatan infrastruktur perjalanan dan iklan lokasi wisata.

Dengan begitu kompleksnya muatan IA-CEPA dengan berbagai peluang ekonomi yang ditawarkan, tentunya perjanjian ini tidak hanya berdampak pada tingkat nasional tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam implementasinya. Pemerintah daerah juga dapat menjadikan IA-CEPA sebagai pondasi awal yang telah dibangun oleh pemerintah pusat untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah sub-nasional di Australia. Kerja sama seperti *sister city* atau *sister province* dirasa tepat untuk mempromosikan kepentingan masing-masing daerah di Indonesia. Jakarta dengan visi besarnya untuk menjadi kota bisnis skala global pun telah memiliki hubungan kerja sama dengan New South Wales yang merupakan negara bagian dengan perekonomian terbesar di Australia. Industri jasa New South Wales pun sangat berkembang pesat, terutama di bidang bisnis, pendidikan, pariwisata, dan jasa keuangan (KJRI SYDNEY, n.d.).

Dalam pertemuan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, bersama dengan Gubernur New South Wales, Margaret Beazley, di Balai Kota Jakarta, dibahas mengenai kerja sama bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, UMKM, hingga pengembangan *startup* (Azzahra, 2023). Kerja sama antar kedua sub-nasional dalam bidang tersebut merupakan bentuk kerja sama sesuai dengan MoU *sister province* terbaru yang disepakati pada tahun 2022. Lebih lanjut, implementasi yang efektif dari MoU ini diharapkan membantu Jakarta untuk berkembang menjadi kota bisnis global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

## Perjalanan Kerja Sama *Sister Province* Jakarta dan New South Wales

Indonesia telah menjajaki banyak kerja sama yang melibatkan urusan domestik dengan negara luar. Hal ini didasari oleh kepentingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah menjanjikan, dapat dilihat dari masuknya Indonesia ke dalam G20 yang merupakan perkumpulan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia (Beeson & Lee, 2015). Perkembangan perekonomian Indonesia tentu tidak mampu ditopang sendiri, kemitraan dengan beberapa negara diperlukan untuk menjamin pertumbuhan tetap stabil dan mengamankan rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Australia sebagai salah satu negara mitra dan tetangga Indonesia telah menjalin kedekatan mulai dari zaman orde lama atau pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno. Australia juga dikatakan memiliki kedekatan yang cukup signifikan atas dasar persamaan beberapa aspek geografis (Hakiem & Amalia, 2021).

Di samping hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, era diplomasi kontemporer saat ini juga memungkinkan sub-nasional di masing-masing kedua negara untuk melakukan kerja sama. Dalam hal ini Kota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional jelas mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri, dalam bentuk kerja sama multi-level ini (Paquin, 2020). Adaptasi terhadap globalisasi juga telah menuntun Jakarta untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional untuk meningkatkan kegiatan perekonomian baik untuk level Jakarta sendiri maupun tingkat nasional. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh Jakarta dengan menjalin kerja sama *sister city* atau *sister province* sebagai salah satu bentuk diplomasi kontemporer. Konsep *sister city* secara partikular berkembang seiring hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dengan kata lain, aktor-aktor sub-nasional di masing-masing negara dapat membuka hubungan kerja sama untuk kepentingan daerahnya, selama itu tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

Pada tahun 1994, Jakarta pertama kali melakukan peresmian hubungan kerja sama *sister state-province* dengan negara bagian New South Wales, Australia (Robison, 2018). New South Wales sendiri merupakan salah satu negara bagian di pesisir tenggara Australia dengan kontribusi ekonomi yang tinggi. Hal ini memiliki kesamaan dengan Jakarta yang juga merupakan daerah pesisir utara Jawa dengan kontribusi perekonomian tertinggi di Indonesia. Sehingga kerja sama *sister state-province* antara Jakarta dan New South Wales tepat berfokus

terhadap bidang ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama antara Jakarta dan New South Wales pada periode 2018-2019, telah memfokuskan dalam bidang ekonomi dan juga melibatkan berbagai aktivitas kunjungan timbal balik. Beberapa kegiatan penting termasuk kunjungan Menteri Perdagangan NSW, Niall Blair, ke Jakarta dan kunjungan delegasi dari Pemprov DKI Jakarta ke Sydney, untuk mengikuti pelatihan *benchmarking* mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ada *Joint Working Group I* dan kunjungan delegasi Pemprov DKI Jakarta serta BUMD Provinsi Jakarta ke Sydney untuk mengadakan *Jakarta Business Forum (JBF) Luncheon 2019*. Acara ini diadakan bersamaan dengan *Indonesia-Australia Business Forum (IABS)* pada tanggal 18 September 2019 (KJRI Sydney, 2020).

Pada tahun 2023 dihasilkan juga beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang saling menguntungkan melalui bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Melalui praktik pendidikan dan ekonomi kreatif, Australia memberikan bantuan terhadap edukasi mengenai aplikasi kreatif dan memberikan informasi mengenai universitas terbaik yang ada di Australia, khususnya di New South Wales, seperti Universitas University of Newcastle, University of Wollongong, University of New England, dan lain lain kepada pelajar SMA dan SMP di Jakarta (Robison, 2018). Selain itu, ada juga program tersebut New South Wales pelatihan tenaga pendidik dan studi layanan penyandang disabilitas (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, New South Wales dan Jakarta juga saling bertukar informasi mengenai kebudayaan dari pameran kebudayaan dan pertukaraan informasi mengenai pariwisata, salah satunya adalah promosi tempat dan objek wisata. Di Jakarta tersedia berbagai objek rekreasi wisata seperti Pantai Ancol, Monumen Nasional, dan lain-lain. NSW juga mempromosikan wisata mereka mulai dari wisata alam Pantai Teluk Byron di utara New South Wales, Pelabuhan Coffs, Lismore, Nowra, dan PortMacquarie, dan Pegunungan Snowy. Kerja sama antara kedua daerah tersebut telah beberapa kali memperbaharui *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk tetap berkomitmen lebih lanjut dalam bekerja sama. Terakhir pembaharuan tersebut dilakukan di Indonesia 12 Oktober 2022 dan di Sydney 27 Oktober 2022 (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, 2023).

### **Penguatan *Sister State-Province* Jakarta-New South Wales setelah Adanya IA-CEPA**

Kerja sama *Sister Provinces* antara Jakarta dan New South Wales, terutama setelah implementasi IA-CEPA, menjanjikan potensi yang luas dan beragam dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu potensi utama yang dapat diperkuat adalah kerja sama ekonomi antara DKI Jakarta dan New South Wales. Setelah adanya IA-CEPA, terdapat beberapa faktor pendorong yang berpotensi memperkuat kerja sama tersebut, termasuk untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, pendidikan, budaya, dan hubungan antarwarga kedua wilayah ini.

Dengan adanya IA-CEPA yang secara langsung juga mendorong kerja sama Jakarta dan New South Wales, beberapa potensi penguatan kerja sama tersebut di antaranya:

- 1) IA-CEPA membuka pintu bagi peluang perdagangan dan investasi yang lebih besar antara DKI Jakarta dan New South Wales (Suranto, 2023). Dengan penghapusan atau pengurangan tarif serta hambatan perdagangan lainnya, perusahaan-perusahaan di kedua wilayah akan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar masing-masing (IA-CEPA Katalis, n.d.). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan volume perdagangan dan investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini tentu saja dapat dijadikan langkah besar untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis global pasca tidak lagi menyangand sebagai ibu kota negara.
- 2) IA-CEPA juga mendorong kerja sama *sister state provinces* Jakarta dan New South Wales dalam hal pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan memfasilitasi transfer teknologi, akses pasar untuk produk inovatif, serta investasi dalam riset dan pengembangan, perjanjian tersebut membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi, manufaktur canggih, bioteknologi, dan energi terbarukan. Melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi, Jakarta dan New South Wales dapat saling memperkuat kapasitas mereka dan meningkatkan daya saing di pasar global, sekaligus dapat mempercepat upaya Jakarta menuju *smart city*.
- 3) Selain aspek ekonomi dan teknologi, penguatan *sister province* juga dapat dicapai melalui pertukaran pendidikan dan budaya yang lebih intensif. IA-CEPA memfasilitasi pertukaran siswa, pengajar, seniman, dan budayawan antar kedua negara. Jakarta dan New South Wales juga dapat menggunakan peluang ini untuk

menciptakan kesempatan dan memperluas wawasan serta pemahaman tentang budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing (Suranto, 2023). Melalui kerja sama pendidikan dan budaya, Jakarta dan New South Wales dapat memperkaya pengalaman pendidikan bagi guru dan peserta didik, memfasilitasi pertukaran ide dan gagasan, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya antara masyarakat kedua wilayah ini.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, dukungan politik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat kerja sama *sister state province*. Kebijakan yang progresif dan insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai sektor dalam mendukung kerja sama lintas batas. Selain itu, keterlibatan aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mendukung program-program kerja sama juga penting untuk memperkuat dampaknya pada pembangunan ekonomi dan sosial di kedua wilayah.

Berangkat dari peluang-peluang tersebut, tentunya Pemerintah Jakarta harus memanfaatkan berbagai strategi dan inisiatif dengan baik, sehingga *sister provinces* dan IA-CEPA ini dapat menciptakan hubungan yang lebih erat, saling menguntungkan, dan berkelanjutan di masa depan. Penguatan kerja sama ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua wilayah, tetapi juga akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara masyarakat, memperkaya kehidupan budaya, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Novialdi & Rasanjani, 2022). Dengan demikian, IA-CEPA sendiri telah memberikan kerangka kerja bagi entitas sub-nasional untuk terlibat dalam hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih erat. Dalam konteks ini, Jakarta dan New South Wales dapat memanfaatkan IA-CEPA untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan, terkhusus bagi Jakarta yang memiliki visi besar sebagai kota bisnis berskala global.

### **IA-CEPA dalam *Sister State-Province* Jakarta dan New South Wales**

Perjanjian tanpa implementasi hanyalah sebuah dokumen tidak berharga, oleh karena itu sejak awal proses perundingan, IA-CEPA telah melibatkan aktor-aktor berpengaruh atau yang nantinya akan terlibat dalam implementasi perjanjian ini. Kementerian Perdagangan sebagai negosiator utama IA-CEPA juga telah membuka kanal-kanal diskusi dengan

akademisi, dan juga melibatkan pelaku bisnis (Podcast HI UGM Episode 06, 2020). Selain itu, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam beberapa hal, sebagai contoh pada *Australia Business Summit* tahun 2019 yang mengangkat tema IA-CEPA terdapat delegasi dari pemerintah daerah (Wulandari & Suryadipura, 2021). Lebih lanjut keterlibatan pemerintah daerah dalam forum ini juga dikarenakan adanya upaya untuk mempromosikan keunggulan dan kepentingan daerah masing-masing dalam rangka untuk menarik investor dari Australia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala IIPC Sydney yang mengajak para investor untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah di Indonesia terutama daerah-daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Peran pemerintah daerah dalam implementasi IA-CEPA juga dapat terlihat dari adanya hubungan *sister province* yang makin erat antara DKI Jakarta dengan negara bagian New South Wales. Pada bulan Juni, 2019, delegasi DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan tugas ke New South Wales, guna membicarakan peluang kerja sama yang bisa ditingkatkan antara Jakarta dan NSW terutama setelah disepakatinya IA-CEPA oleh pemerintah pusat masing-masing. Matnoor Tindoan sebagai pimpinan delegasi sekaligus ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa IA-CEPA perlu dimanfaatkan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Jakarta, yang bisa dicapai melalui mekanisme pendidikan dan *training* antarpemerintah atau swasta, pemberian beasiswa, maupun MoU pada enam bidang keterampilan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Dalam kunjungan tersebut para delegasi juga menjadikan NSW sebagai percontohan kota dengan manajemen yang baik terkait penanggulangan kebakaran, dan juga tata kota yang mengusung keberlanjutan. Dalam kunjungan ini, delegasi DPRD DKI Jakarta juga mengapresiasi kerja sama yang tengah berlangsung, seperti pertukaran satwa antara Kebun Binatang Ragunan dan Taronga Zoo (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Dalam konteks lembaga eksekutif, Pemprov DKI Jakarta dan New South Wales juga menyetujui perpanjangan kerja sama *sister province* pada tahun 2022, dan berlaku selama lima tahun. Pemprov DKI Jakarta menganggap bahwa kerja sama ini penting untuk terus dilanjutkan demi menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis global pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibukota. Perpanjangan kerja sama ini tertuang dalam MoU baru dengan berfokus pada empat bidang, di antaranya agribisnis, industri makanan dan minuman, teknologi, inovasi dan *startup*, pariwisata dan pendidikan. Empat bidang utama tersebut diharapkan dapat membawa kolaborasi yang lebih efektif dan menguntungkan bagi kedua

belah pihak terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Pariwisata dan pendidikan merupakan sektor yang terus didorong, yang mana diharapkan nantinya akan ada korelasi antara kesempatan belajar dan juga pariwisata.

Adanya IA-CEPA dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan, merupakan salah satu alasan New South Wales memperpanjang kerja sama *sister province* dengan Jakarta. Minister for Enterprise, Investment and Trade, New South Wales, Alister Henskens, menyampaikan bahwa ini merupakan kesempatan besar bagi NSW untuk melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia, khususnya Jakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta merupakan kota metropolitan dengan pasar yang besar dan menjanjikan serta kebutuhan akan kesehatan, teknologi, dan infrastruktur juga kian meningkat (Gold, 2022). Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah melalui investasi dan ekspansi bisnis.

Kerja sama seperti ini jelas diperlukan bagi keberlanjutan perekonomian di Jakarta, mengingat dengan dikeluarkannya Undang-Undang IKN pada 15 Februari 2022, Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengukuhkan posisi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi magnet investasi dari dalam maupun luar negeri. Mainake (2024), berpendapat bahwa Jakarta memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi, keuangan, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut haruslah digunakan sebaik mungkin oleh pemerintah, yang salah satunya bisa dicapai melalui kerja sama dengan New South Wales untuk mempertajam kekhasan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota bisnis global yang mampu bersaing dengan kota-kota besar di dunia seperti Sydney dan New York. Hal ini juga sejalan dengan visi besar pembangunan di Jakarta yang menargetkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global (Jakarta.go.id, 2024).

Dalam beberapa kerangka akademik yang dipublikasikan oleh The Globalization and World Cities Research Network (GaWC), Global City Index (GCI), hingga Cities in Motion Index, terdapat beberapa indikator dalam indeks kota global. Dari berbagai jenis lembaga penelitian tersebut selalu terdapat indikator ekonomi yang juga meliputi kegiatan bisnis seperti jasa keuangan. Lebih lanjut Bappeda Provinsi DKI Jakarta, juga menerapkan enam indikator kota global, yang meliputi ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global,

kapasitas riset dan inovasi yang baik dan berkesinambungan, nyaman untuk dihuni, *cultural value* yang menarik wisatawan, lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, serta terkoneksi secara intra dan inter-kota (Sofa, 2024).

Dengan adanya kerangka perjanjian IA-CEPA antara Indonesia dan Australia serta MoU *sister state-province* antara Jakarta dan New South Wales beberapa indikator kota global tersebut dapat dicapai Jakarta dengan implementasi kerja sama konkret, yang meliputi:

1) Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global

Suatu kota disyaratkan memiliki setidaknya 500 perusahaan kelas dunia untuk mewujudkan mapannya ekonomi dengan terkoneksi secara global. Dalam hal ini Jakarta telah mengupayakan pengembangan ekosistem *startup* digital (Sofa, 2024). Salah satu kolaborasinya dapat dilihat dari adanya ekspansi bisnis *startup* digital penyedia tanda tangan dan identitas digital Privy ID yang berbasis di Jakarta dengan membuka kantor cabang di Sydney, pada Juli 2023. Ini merupakan langkah yang cukup strategis untuk menjadikan *startup* di Jakarta menjadi berkelas global. Sebelumnya Privy ID juga menerima kunjungan dari delegasi The Australian Trade and Investment Commission (Austrade), CEO Austrade, Senior Trade and Investment Commissioner Austrade, Senior Investment Manager Austrade, serta Director Investment NSW (Sugianto, 2023). Kehadiran delegasi dari NSW dan Austrade ini juga menunjukkan adanya dukungan NSW untuk mendorong investasi dan hubungan B2B antara Indonesia dan Australia atau spesifiknya antara Jakarta dan NSW. Langkah ini juga merupakan dukungan bagi *startup* Indonesia untuk berkembang di Australia melalui peningkatan hubungan dagang dan ekspansi pasar. Lebih lanjut, adanya Privy ID di Sydney juga sebagai salah satu ekspor jasa dari Indonesia ke Australia juga merupakan manifestasi dari IA-CEPA itu sendiri.

2) Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Berkesinambungan

Untuk mendukung terbentuknya perusahaan berkelas dunia diperlukan juga tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ahli dan terampil. Selain itu, SDM yang terampil tersebut juga dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi di Jakarta, yang mana hal ini dapat dicapai melalui keunggulan dan performa akademis (Sofa, 2024). Dalam konteks perguruan tinggi, NSW merupakan rumah bagi sebelas *World Class Universities*, dan telah lama menjadi tujuan bagi mahasiswa Indonesia, terutama untuk master dan doktoral. Pada tanggal 25-27 Mei 2023, Pemerintah NSW menyelenggarakan *NSW Education Expo 2023* di Jakarta. Acara ini merupakan ajang promosi bagi perguruan tinggi

di NSW, sekaligus memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai mitra penting dalam bidang pendidikan (NSW Government, 2023). Saat ini universitas-universitas di NSW telah dipilih sebagai tempat pendidikan bagi lebih dari 244.000 mahasiswa internasional lebih dari 170 negara, salah satunya Indonesia (Prasetyo, 2023).

Lebih lanjut, sekitar 55% pelajar Indonesia di Australia memilih universitas-universitas di New South Wales. Ini menunjukkan adanya potensi besar untuk kolaborasi dalam bidang pendidikan, yang salah satunya adalah riset dan inovasi menuju *Jakarta Smart City*, yang mana IA-CEPA dan *sister-state province cooperation* telah menyediakan ruang fleksibilitas kerja sama berupa dukungan dana riset dan saran praktis dengan beberapa mitra di Australia. Selain itu, ada juga kesempatan untuk bertukar pengalaman serta keahlian yang mana kedua hal ini dapat berdampak positif bagi sumber daya manusia masing-masing wilayah untuk mendukung sektor industri (Kedutaan Besar Australia, n.d.). Hal ini juga sejalan dengan pendapat mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang mengharapkan kerja sama *sister province* antara Jakarta dan New South Wales ini dapat menjadi sebuah *platform* untuk saling belajar dan saling menguntungkan dalam konteks upaya pembangunan di masing-masing wilayah (Gold, 2022). Lebih lanjut Beliau juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan Jakarta sebagai *smart city*. Melalui Kerja sama ini juga diharapkan adanya peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman kota di masa depan, seperti kesehatan dan perubahan iklim. Melalui kerja sama ini kedua pihak dapat belajar satu sama lain (Gold, 2022).

Peran serta institusi pendidikan juga diperlukan untuk mencapai Jakarta sebagai kota global, yang mana kualitas pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik pula, selain itu hal ini juga penting bagi daya saing Jakarta di tingkat global (Wahyuni, 2024). Dalam konteks kerja sama *university to university cooperation* (u to u), salah satu universitas di Jakarta yaitu Universitas Pancasila telah menyepakati kerja sama dengan UNSW Law School dalam bidang ilmu hukum. Kerja sama ini dilakukan Universitas Pancasila untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dengan universitas terbaik di luar negeri, yang mana UNSW Law School merupakan fakultas hukum terbaik ke-14 di dunia. Beberapa langkah konkret dalam kerja sama ini dilakukan dalam bentuk seminar dan *workshop*, yang melibatkan akademisi dari kedua universitas tersebut (KJRI Sydney, 2019). Hubungan ini merupakan salah satu bentuk pilar *people to people connection* dalam *Indonesia and Australia Comprehensive Strategic Partnership*.

3) Cultural Value yang Menarik Wisatawan

Nilai-nilai dan keragaman budaya juga merupakan hal penting bagi kota global, kebudayaan yang menarik serta sarana pariwisata yang bertaraf internasional dapat mendatangkan wisatawan dari luar negeri (Sofa, 2024). Dalam hal ini Jakarta memiliki beragam potensi pariwisata, mulai dari wisata bahari Kepulauan Seribu dan Ancol Dreamland, wisata sejarah yang berupa kawasan Kota Tua dan Monumen Nasional, serta jenis wisata lain seperti hiburan dan pusat perbelanjaan berkelas dunia. Selain itu, sebagai replika dari Indonesia, kebudayaan di Jakarta pun sangat beragam, yang mana kebudayaan asli Betawi telah bercampur dan hidup berdampingan dengan kebudayaan lain seperti Tionghoa, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya.

Dalam upaya untuk memenuhi indikator dalam bidang ini, Jakarta memerlukan adanya kolaborasi internasional berupa penyelenggaraan acara dan kunjungan internasional. Dalam hal ini, kerja sama *sister province* atau *sister city* Jakarta dengan beberapa sub-nasional lain, salah satunya New South Wales merupakan salah satu langkah strategis untuk menginternasionalisasikan kebudayaan lokal yang akan menarik wisatawan mancanegara. Dengan kata lain melalui kerja sama ini kedua wilayah dapat mempromosikan destinasi wisata dan meningkatkan jumlah wisatawan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran budaya dan promosi pariwisata, yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Berbagai upaya promosi pariwisata dan kebudayaan di Jakarta juga telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dengan menggenjot sektor MICE atau *meeting, incentive, conference, exhibition, leisure, and event*. Promosi destinasi MICE di Jakarta dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, promosi digital pariwisata Jakarta, promosi melalui media luar ruang, dan media cetak luar negeri (Nurhaliza, 2024). Di samping itu, untuk mempromosikan wisata dan kebudayaan di Jakarta ke Australia, PJ Gubernur Heru Budi telah mengirimkan delegasi Pemprov DKI Jakarta ke New South Wales untuk menyelenggarakan penyajian budaya Jakarta pada Oktober 2023 (Nurhaliza, 2023). Secara keseluruhan, promosi budaya seperti ini dapat meningkatkan *city branding, nation branding, dan people branding* yang kemudian dapat berdampak positif bagi keberlanjutan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta.

## **Peluang dan Tantangan Keberlangsungan Kerja Sama *Sister State-Province* DKI Jakarta dan New South Wales setelah IA-CEPA**

### **1) Peluang**

Hubungan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan New South Wales telah berlangsung sejak tahun 1994 dan menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang pada 2022 lalu diperbarui untuk lima tahun ke depan (Suranto, 2023). Peluang paradiplomasi dalam implementasi IA-CEPA serta kerja sama antara Jakarta dan NSW dalam konteks *sister state province cooperation* sangatlah luas dan signifikan. Pertama, IA-CEPA membuka pintu bagi peningkatan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Kesepakatan perdagangan ini tidak hanya menghilangkan hambatan-hambatan tarif, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang menguntungkan bagi perusahaan dan pelaku usaha di Jakarta dan NSW untuk mengakses pasar satu sama lain dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini menciptakan peluang yang besar untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan volume perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja baru di kedua wilayah.

Selain itu, paradiplomasi juga membuka peluang untuk meningkatkan pertukaran teknologi dan inovasi antara Jakarta dan NSW. Dengan mengimplementasikan IA-CEPA, kedua wilayah dapat saling memanfaatkan keunggulan teknologi masing-masing untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, manufaktur canggih, dan energi terbarukan. Pertukaran pengetahuan dan teknologi ini tidak hanya akan membantu meningkatkan daya saing global kedua wilayah, tetapi juga akan membawa manfaat jangka panjang bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan teknologi, paradiplomasi juga membuka peluang untuk pertukaran pendidikan dan budaya yang lebih luas antara DKI Jakarta dan NSW. Melalui IA-CEPA, pertukaran siswa, pengajar, seniman, dan budayawan antar kedua wilayah dapat dipermudah dan didorong. Ini akan membawa manfaat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan potensi budaya, dan memperkuat hubungan antarwarga kedua wilayah. Di samping itu ada juga peluang kerja sama pembangunan pariwisata bahari yang bisa dikembangkan melalui keleluasaan investasi yang telah difasilitasi oleh IA-CEPA.

Dengan demikian, peluang untuk memperluas kerja sama lintas batas dalam bidang pendidikan dan budaya menjadi lebih besar, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara masyarakat Jakarta dan NSW. Dengan mendasarkan pada potensi-potensi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi memiliki peran yang sangat

penting dalam memperkuat implementasi IA-CEPA serta kerja sama *sister state-province cooperation* antara Jakarta dan NSW. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kedua wilayah dapat saling menguntungkan satu sama lain dan menciptakan hubungan yang lebih erat serta berkelanjutan di masa depan (Novialdi & Rasanjani, 2022). Lebih lanjut, IA-CEPA juga mencakup *environmental services*, teknologi, pendidikan, dan transportasi, yang mana empat sektor utama tersebut menyediakan peluang besar bagi Jakarta untuk mentransformasikan diri menjadi kota pintar (*smart city*).

Jika berkaca pada kesamaan kondisi geografis, keunggulan dan potensi ekonomi antara Jakarta dan NSW terutama dalam hal pariwisata bahari, maka diperlukan program kerja sama yang lebih intens terutama terkait dengan pembangunan fasilitas pariwisata di Kepulauan Seribu. Jakarta pun bisa menjadikan tata kelola pariwisata bahari di NSW sebagai acuan. Selain itu, IA-CEPA yang memudahkan investor dari Australia untuk masuk ke Indonesia juga harus dimanfaatkan oleh Jakarta untuk membangun fasilitas pariwisata bahari berkelas internasional di Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, dengan adanya IA-CEPA dan *sister province* ini promosi pariwisata dan industri jasa MICE bagi turis dan pelaku bisnis asal Australia harus ditingkatkan guna mendiversifikasi perekonomian Jakarta sekaligus menambah devisa nasional.

## 2) Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi IA-CEPA serta kerja sama antara Jakarta dan New South Wales dalam konteks *sister state-province cooperation* meliputi berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi antara kedua wilayah. Perbedaan ini bisa menjadi hambatan dalam komunikasi, pemahaman, dan koordinasi antara Jakarta dan NSW. Selain itu, perbedaan dalam kebiasaan bisnis, standar kualitas, dan peraturan perdagangan bisa memperlambat proses implementasi kerja sama dan mempersulit tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Novialdi & Rasanjani, 2022).

Masalah logistik dan birokrasi juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi IA-CEPA dan *sister state-province cooperation*. Proses perizinan, pengiriman barang, dan administrasi lainnya bisa menjadi rumit dan memperlambat kemajuan kerja sama antara Jakarta dan NSW (Rusmin et al., 2021). Ketidakpastian terkait prosedur dan persyaratan hukum di masing-masing wilayah juga dapat menghambat investasi dan perdagangan antara kedua belah pihak. Diperlukan upaya yang besar untuk menyederhanakan

proses administratif dan memastikan bahwa kendala birokrasi tidak menghambat implementasi kerja sama. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor lain di dalam dan di luar wilayah, seperti pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, juga dapat menjadi tantangan kelembagaan tersendiri.

Lebih lanjut, politik paradiplomasi Indonesia yang cenderung konservatif juga menjadi tantangan tersendiri, yang mana Jakarta yang progresif dan bersemangat untuk melakukan paradiplomasi harus dibatasi geraknya dalam menjalin hubungan internasional (Mukti, 2020). Hal ini kemudian berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan peraturan Indonesia yang seringkali menghadirkan rintangan dalam menarik dan mengelola investasi asing dari NSW ataupun Australia secara lebih luas. Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan yang dapat menghambat pelaksanaan program-program kerja sama. Selain itu, adanya pergeseran kepemimpinan politik atau perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal juga dapat mempengaruhi dinamika kerja sama antara DKI Jakarta dan NSW.

Tantangan lain dalam IA-CEPA adalah ketidakseimbangan perdagangan yang dapat muncul ketika Indonesia tidak dapat mengambil manfaat penuh dari peluang yang tersedia. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sumber daya manusia dan dukungan keuangan yang berbeda antara Jakarta dan NSW. Menurut Mukti (2020) dua hal tersebut seringkali mempengaruhi sikap daerah untuk memanfaatkan paradiplomasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk memaksimalkan manfaat IA-CEPA dan mengisi program-program *sister province* secara konkret. Keberlanjutan dan dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan ketika mengimplementasikan IA-CEPA, terutama dalam konteks keberlanjutan dan kondisi lingkungan di Jakarta yang seringkali menuai kritik. Maka, peningkatan perdagangan serta investasi tersebut harus dikontrol dengan baik (Novialdi & Rasanjani, 2022).

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif yang kuat antara semua pihak terkait di Jakarta dan NSW. Koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, sehingga peluang-peluang dalam implementasi IA-CEPA dan *sister state-province cooperation* dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan manfaat yang signifikan bagi kedua wilayah. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara

proaktif dan berkelanjutan, kerja sama lintas batas antara Jakarta dan NSW dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

## KESIMPULAN

Terciptanya diplomasi bilateral atau hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Australia yang berfokus pada peningkatan perekonomian yakni IA-CEPA menghasilkan peluang untuk melakukan paradiplomasi yang merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sub-nasional atau pemerintah daerah. Dalam hal ini Jakarta dan New South Wales sudah melakukan kerja sama *sister province* sejak tahun 1994. Dalam kerja sama tersebut memiliki beberapa aspek penting yakni, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan bisnis digital, yang mana bidang ini sangat relevan dengan visi Jakarta untuk menjadi kota bisnis global pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dalam bidang pendidikan dilakukan program yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui *training* yang diberikan untuk tenaga ahli. Lalu, program yang dilakukan dalam bidang pariwisata adalah mempromosikan berbagai tempat pariwisata yang terdapat di daerah Jakarta dan NSW. Pada bidang ekonomi terdapat penghapusan atau pengurangan tarif atau hambatan lainnya yang menyangkut perdagangan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kuantitas perdagangan dan investasi ataupun ekspor dan impor. Dan di bidang bisnis digital terdapat transfer teknologi, pertukaran pengetahuan ataupun investasi melalui riset dan pengembangan. Salah satu contohnya ekspansi *stratup* digital Jakarta ke NSW.

Melalui berbagai aspek penting kerja sama *sister province* Jakarta dengan NSW akan menciptakan peluang yang besar dalam mengembangkan SDM, memajukan pasar di tingkat global, mengoptimalkan dari masing-masing teknologi melalui pertukaran atau transfer teknologi yang dimiliki, dan juga dapat mempererat hubungan antar kedua wilayah ataupun kedua negara dengan memanfaatkan peluang-peluang yang dapat berkepanjangan di masa depan. Namun, tidak terlepas juga dari berbagai tantangan yang dihadapi karena adanya kemungkinan dalam perbedaan budaya, regulasi, ataupun pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak pada kerja sama *sister province*. Oleh karena itu, Jakarta harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah NSW agar IA-CEPA maupun program *sister province* dapat bermanfaat bagi keberlanjutan ekonomi di Jakarta untuk menjadi kota bisnis berskala global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, L. N., Damayanti, C., Narulita, U., Handayani, T. P., & Info, A. (2023). Development of Sister City Cooperation Between Semarang and Jung-gu in 2009–2017. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/JPCN.V2I1.22>
- Australian Embassy Indonesia. (n.d.). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Retrieved June 12, 2024, from <https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/trade.html>
- Azzahra, T. A. (2023). *Heru Budi Bertemu Gubernur New South Wales Bahas Start Up Pendidikan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6738440/heru-budi-bertemu-gubernur-new-south-wales-bahas-start-up-pendidikan>
- Bakri, H. (2024). Analisis Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia/IA-CEPA. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I2.9640>
- Beeson, M., & Lee, W. (2015). The Middle Power Moment: A New Basis for Cooperation between Indonesia and Australia? In C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's Ascent. Critical Studies of the Asia Pacific Series*. Palgrave Macmillan, London. [https://doi.org/10.1057/9781137397416\\_11](https://doi.org/10.1057/9781137397416_11)
- BPSDM Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Kunjungan Gubernur NSW Ke Jakarta*. <https://bpsdm.jakarta.go.id/berita/12>
- Chung, C. P. (2011). The “Good Neighbour Policy” in the Context of China’s Foreign Relations. 7(1). <https://doi.org/10.1142/S0219747209000272>
- Cornago, N. (2018). Paradiplomacy and Protodiplomacy. *The Encyclopedia of Diplomacy*. <https://doi.org/10.1002/9781118885154.DIPL0211>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2018). *Fact Sheet Indonesia Australia CEPA*. [https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20181015\\_fact-sheetindonesia-australia-cepa.pdf](https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheetindonesia-australia-cepa.pdf)
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48595/22116>
- Gold, G. (2022). *Australia's biggest state, New South Wales, and Indonesia's special capital province, DKI Jakarta, sign a new edition of their often disrupted sister-region MOU*.

- Indonesia Australia Report. <https://www.indonesia-australia.com/2022/11/australias-biggest-state-new-south.html>
- Hakim, F. N., & Amalia, N. R. (2021). Local Government: The Impact of International Cooperation on Economic Security in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210120.109>
- Haqqi, S. H. H. (2018). Festival Kebudayaan Canberra Sebagai Alat Diplomasi Pemerintah Indonesia Di Australia (2014-2015). *Research Fair UNISRI*, 2(1). <https://doi.org/10.33061/RSFU.V2I1.2015>
- HI UGM. (2020). *Podcast HI Episode 06: Kesiapan Indonesia Menghadapi IA-CEPA* [Broadcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=vCdgpCYvtuU>
- IA-CEPA Katalis. (n.d.). *About IA-CEPA*. Retrieved June 12, 2024, from <https://iacepa-katalis.org/about-ia-cepa/>
- Jakarta.go.id. (2024). *Membangun Jakarta: Kota Cerdas Berskala Global*. <https://www.jakarta.go.id/page/membangun-jakarta-kota-cerdas-berskala-global>
- Kedutaan Besar Australia. (n.d.). *Kemitraan*. Department of Foreign Affairs and Trade.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *DPRD Jakarta: IA-CEPA Peluang Perkuat Kerja Sama Jakarta-New South Wales*. <https://kemlu.go.id/sydney/id/news/1193/dprd-jakarta-ia-cepa-peluang-perkuat-kerja-sama-jakarta-new-south-wales>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Action Plan For The Comprehensive Strategic Partnership Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia 2020 2024*. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/4327/halaman\\_list\\_lainnya/action-plan-for-the-comprehensive-strategic-partnership-between-the-government-of-the-republic-of-indonesia-and-the-government-of-australia-2020-2024](https://kemlu.go.id/portal/en/read/4327/halaman_list_lainnya/action-plan-for-the-comprehensive-strategic-partnership-between-the-government-of-the-republic-of-indonesia-and-the-government-of-australia-2020-2024)
- Kementerian Perdagangan. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)*.
- KJRI PERTH. (n.d.). *Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Retrieved August 10, 2024, from [https://www.kemlu.go.id/perth/id/pages/hubungan\\_bilateral/4945/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/perth/id/pages/hubungan_bilateral/4945/etc-menu)
- KJRI SYDNEY. (n.d.). *Sekilas New South Wales (NSW)*. Retrieved June 12, 2024, from [https://www.kemlu.go.id/sydney/id/pages/new\\_south\\_wales/5161/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/sydney/id/pages/new_south_wales/5161/etc-menu)

- KJRI Sydney. (2019). *Pancasila University of Jakarta and UNSW Agree to Establish Cooperation in Legal Area*. <https://kemlu.go.id/sydney/en/news/3442/pancasila-university-of-jakarta-and-unsw-agree-to-establish-cooperation-in-legal-area>
- KJRI Sydney. (2020). *Rencana Strategis KJRI Sydney 2020-2024*.
- Mainake, Y. (2024). Urgensi RUU Daerah Khusus Jakarta Dan Prospek Jakarta Sebagai Pusat Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI*, 16(6).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd ed.* Sage Publications, Inc.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Issue June). The Phinisi Press. [https://www.researchgate.net/publication/342122523\\_Paradiplomacy\\_Kerjasama\\_Luar\\_Negeri\\_Oleh\\_Pemda\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/342122523_Paradiplomacy_Kerjasama_Luar_Negeri_Oleh_Pemda_Di_Indonesia)
- Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsultasi*, 6(September). [https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379737\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379737_file_mpr.pdf)
- Novialdi, R., & Rasanjani, D. S. (2022). Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.24815/GASPOL.V3I2.29450>
- NSW Government. (2023). *Indonesian expo showcases NSW as best place to study*. <https://www.investment.nsw.gov.au/news-and-events/media-releases/indonesian-expo-showcases-nsw-as-best-place-to-study/>
- Nurhaliza, S. (2023). *Pemprov DKI dan New South Wales kerja sama wujudkan kota bisnis*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/3556011/pemprov-dki-dan-new-south-wales-kerja-sama-wujudkan-kota-bisnis>
- Nurhaliza, S. (2024). *Pariwisata DKI kembangkan program untuk dongkrak kunjungan wisatawan*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/3954042/pariwisata-dki-kembangkan-program-untuk-dongkrak-kunjungan-wisatawan>
- Paquin, S. (2020). *Paradiplomacy*. In *Global Diplomacy*. Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_4)
- Prasetyo, B. (2023). *Expo Pendidikan New South Wales pamerkan layanan edukasi di Jakarta*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/3555321/expo-pendidikan-new-south-wales-pamerkan-layanan-edukasi-di-jakarta>

- Rissy, Y. Y. W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198>
- Robison, R. (2018). Strangers Next Door: Indonesia And Australia In The Asian Century. Edited by Tim Lindsey and Dave McRae. Oxford: Hart, 2018. *Journal of Contemporary Asia*. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1501509>
- Rusmin, J. H., Suryadi, A., & Abdullah, N. (2021). Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(2). <https://doi.org/10.31947/HJIRS.V1I2.15111>
- Sofa, A. (2024). *Upaya Jakarta Menuju Kota Global*. Jakarta Smart City. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/upaya-jakarta-menuju-kota-global/>
- Sugianto, D. (2023). *Startup Digital RI Genjot Bisnis di Australia*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/fintech/d-6923801/startup-digital-ri-genjot-bisnis-di-australia>
- Suranto, G. (2023). *Jakarta Jalin Kerja Sama Berbagai Bidang dengan New South Wales*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/744008/jakarta-jalin-kerja-sama-berbagai-bidang-dengan-new-south-wales>
- Wahyuni, W. (2024). *Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Begini Kondisi Jakarta Selanjutnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-lagi-jadi-ibu-kota-negara--begini-kondisi-jakarta-selanjutnya-lt662ffc6e9da22/?page=2>
- Wijayanti, Y. (2015). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. *Jurnal Artefak Universitas Galuh Ciamis Indonesia*, 3(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/download/1109/pdf>
- Wulandari, A. R., & Suryadipura, D. (2021). Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/PADJIR.V3I2.33521>

